

## Editorial

Edisi ini bertema "Koperasi dalam Pemberdayaan Perempuan". Mengapa demikian ? Karena edisi ini merupakan edisi khusus untuk menjelaskan keberadaan wanita dalam berkoperasi. Perempuan menjadi nomor dua. Begitulah posisi kaum wanita yang kerap disejajarkan apabila bersanding dengan kaum lelaki. Kaum wanita atau perempuan mempunyai kodratnya sendiri sebagai pendamping suami, ratu di rumah tangga dan pengasuh yang baik bagi anak-anaknya. Sementara kaum lelaki mempunyai beban yang tidak kalah berat, sebagai suami, kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan ekonomi keluarganya.

Distribusi peran secara seksual itu, bagai keniscayaan sejarah yang aksiomatis, bahkan di-amini oleh norma-norma adat dan agama. Perlawanan terhadap insinusi gender itu bukannya tidak dilakukan. Di masyarakat Barat, misalnya, pada era 70 dan 80 an, kalangan wanita di Amerika Serikat (AS) menuntut peran yang setara dengan kaum lelaki. Bahwa apa yang dapat dikerjakan oleh kaum lelaki, dapat pula dilakukan kaum wanita. Itu sebabnya, secara positif kemudian lahir para pelaut, pilot, pemain sepak bola bahkan petinju dari kalangan wanita.

Sah-sah saja memang. Namun tuntutan peran itu belakangan kian kabur. Tuntutan emansipasi itu membentur kodrat kewanitaan yang sejati, di mana wanita punya hak untuk melahirkan, menyusui serta keterbatasan genital yang tidak dimiliki kaum lelaki. Di penghujung 80-an di AS dan juga beberapa negara di Eropa muncul syndrome gender yang disebut *Cinderella Complex*. Kaum perempuan akhirnya menyadari bahwa keterbatasan genital itu telah memberi peran-peran spesifik, yang tidak bisa dikerjakan oleh kaum lelaki. Mereka menyadari bahwa tempat mereka yang paling pas adalah di rumah.

Apakah tuntutan kesetaraan itu lalu pudar? Tidak juga. Kaum wanita tetap saja punya peran untuk tampil sebagai pelaku ekonomi andal menggantikan tugas para lelaki. Di negeri kita, misalnya tuntutan terhadap kesetaraan yang tidak asal *gebyah-uyah* seperti di Barat, telah mengemuka jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara. Gerakan koperasi wanita yang berkembang pada 1930-an dan pola tanggung renteng, Mursia Zaafril Ilyas pada 1950-an, pada dasarnya adalah sebuah gerakan dari kesadaran feminis. Kesadaran kaum perempuan akan kondisinya sebagai pihak yang dikalahkan oleh keadaan.

Ketika aktualisasi peran ekonomi wanita di Indonesia mengemuka melalui gerakan koperasi, ada pengharapan bahwa kesetaraan peran itu memang sudah sampai di ujung perjuangan. Idiom koperasi bak identik dengan sosok kaum wanita. Ada roh partisipasi yang secara murni muncul dari kesadaran feminis itu. Bahwa kelebihan peran kaum wanita, yang sabar pendidik dan telaten justru sangat pas dan menemui muaranya di koperasi.

Kendati demikian ada juga sindiran, bahwa gerakan kesadaran itu lebih termotivasi oleh mobilisasi massa. Bahwa perempuan berkoperasi tak lebih dari gerakan massif yang ia sendiri sebenarnya tidak tahu mau kemana?

Dengan pikiran yang jernih agaknya kita perlu mengenyampingkan tudingan pro kontra itu. Kita bersyukur bahwa apa yang telah dicapai oleh pergerakan wanita Indonesia melalui ekonomi koperasi telah menorehkan sejarah penting di negeri ini.

Namun kita pun sadar, bahwa perjuangan itu masih sangat panjang. Di banding total perempuan Indonesia (mengacu sensus BPS) sebanyak 105 juta orang, tercatat baru 200 ribuan saja yang sudah berkoperasi. Jumlah ini memang yang tercantum di 1517 Koperasi Wanita yang tersebar di tanah air. Tetapi jika mengacu pada total koperasi yang mencapai 138.411 unit per 2006. tetap saja jumlahnya belum signifikan. Anggota koperasi tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM per 2006 mencapai 27 juta orang.

Kaum wanita kita boleh jadi berkiperah di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, agama maupun politik. Namun proses menuju kesetaraan gender itu agaknya paling pas melalui aktivitas koperasi.

Tumbuh-kembangnya koperasi-koperasi perempuan sendiri sesungguhnya merupakan reformasi dalam pembangunan koperasi yang selama ini terkesan didominasi oleh kaum laki-laki, akibat struktur sosial budaya yang kurang mendukung peran perempuan. Dengan semakin mudarnya diskriminasi gender, idealnya peran perempuan yang didukung oleh koperasi dalam sistem perekonomian akan semakin besar.

Partisipasi ekonomi kaum wanita secara umum tentu saja lebih rendah dibanding lelaki. Beberapa penyebabnya antara lain terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan, tingkat kesehatan rendah dengan angka kematian ibu yang masih tinggi (307 orang per 100.000 kelahiran), dan keterwakilan di kursi parlemen (11,9% ).

Jika kaum wanita, diyakini sebagai tiang negara, maka ketertinggalan posisi yang marjinal itu tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita acapkali mendengar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Muetia Farida Hatta Swasono, bahwa masih banyak kepentingan perempuan yang belum terakomodasi dengan baik. Secara sosial-budaya patriarki di Indonesia masih kuat sehingga muncul anggapan perempuan tidak bisa ikut bermitra sejajar dengan laki-laki. Tetapi bukankah kita setuju dan tengah menuju kesetaraan peran itu, di mana wanita itu bukan sub-ordinasi kaum lelaki. Sejatinya ia mitra. (*Irsyad Muchtar*)